



BUPATI BENGKALIS

**PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 56 TAHUN 2015**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka perlu diberikan tambahan penghasilan kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan status dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk menjalankan program dan kegiatan.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah adalah calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
8. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri dalam rangka memimpin.

9. Jabatan fungsional adalah jabatan yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelayanan fungsional yang dapat berdasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu seperti : auditor, pengelola keuangan atau pelayanan perizinan.
10. Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya yang tugas utamanya meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis.
11. Jabatan fungsional keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknisi atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih yang tugas utamanya meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metode operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu.
12. Jabatan organik adalah jabatan yang menjadi tugas pokok pada satuan organisasi pemerintah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
14. Unit Kerja adalah Unit Kerja di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai dalam rangka peningkatan kesejahteraan selain gaji dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku.
17. Disiplin adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.
18. Hukuman disiplin adalah hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pemberian tambahan penghasilan bagi PNS berupa tambahan penghasilan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :
 - a. meningkatkan disiplin PNS;
 - b. memotivasi PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan PNS

BAB III

JENIS DAN KRITERIA

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan pegawai diberikan kepada PNS berdasarkan :
 - a. beban kerja;
 - b. tempat bertugas;
 - c. kondisi kerja; dan/atau
 - d. kelangkaan profesi.

Bagian Kedua

Kriteria

Paragraf 1

Beban Kerja

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas - tugas dinilai melampaui beban kerja normal dengan mempertimbangkan tanggung jawab pelaksanaan tugas, intensitas pekerjaan, rentang kendali, fungsi umum, tata hubungan kerja, serta durasi penyelesaian tugas dan fungsi SKPD/Unit Kerja.
- (2) PNS yang dinilai melampaui beban kerja normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS yang dalam melaksanakan tugasnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dengan memperhitungkan eselonering dan golongan/ruang; dan/atau;

- b. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (3) Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. eselon IIa;
 - b. eselon IIb;
 - c. eselon IIIa;
 - d. eselon IIIb;
 - e. eselon IVa;
 - f. eselon IVb; dan
 - g. eselon V.

Paragraf 2
Tempat Bertugas

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil.
- (2) Penetapan Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi untuk diakses dan/atau daerah terpencil ditetapkan melalui keputusan Bupati atas usul kepala SKPD bersangkutan.

Paragraf 3
Kondisi Kerja

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan yang memiliki resiko tinggi.
- (2) Resiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah resiko terhadap ancaman keselamatan dan/atau kesehatan.

Paragraf 4
Kelangkaan Profesi

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (2) Keterampilan khusus dan langka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keterampilan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai PNS dan tidak dimiliki oleh PNS pada umumnya.

- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama rasio kebutuhan terhadap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi.

BAB IV PEMBERIAN

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan pegawai dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah
- (2) Besaran tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- (2) Setiap PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima 1 (satu) atau beberapa tambahan penghasilan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dan dianggarkan dalam APBD.
- (3) PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS dan CPNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji.

Pasal 10

- (1) PNS daerah lainnya yang bekerja atau ditugaskan di Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat diberikan tambahan penghasilan pegawai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. berstatus dipekerjakan atau diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
 - b. tidak menerima tambahan penghasilan yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah lain.
- (2) PNS pindahan dari Pemerintah Daerah lain yang namanya terdaftar dalam daftar gaji diberikan tambahan penghasilan setelah yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas pada SKPD yang bersangkutan terhitung 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (3) Bagi PNS daerah yang dipekerjakan/diperbantukan kepada instansi vertikal dapat diberikan tambahan penghasilan pegawai sepanjang tidak menerima tambahan penghasilan/tunjangan kinerja/renumerasi atau sejenisnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 11

- (1) CPNS diberikan tambahan penghasilan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari besaran nilai tambahan penghasilan.
- (2) Tambahan Penghasilan untuk Pejabat Fungsional Keahlian diatur sebagai berikut :
 - a. Jenjang Utama disamakan dengan eselon IIIb Gol IV;
 - b. Jenjang Madya disamakan dengan eselon IIIb Gol III;
 - c. Jenjang Muda disamakan dengan eselon IVb Gol IV;
 - d. Jenjang Pertama disamakan dengan eselon IVb Gol III.
- (3) Tambahan Penghasilan untuk Pejabat Fungsional Keterampilan diatur sebagai berikut :
 - a. Jenjang Penyelia disamakan dengan eselon V Gol III;
 - b. Jenjang Pelaksana Lanjutan disamakan dengan non eselon Gol IV/a;
 - c. Jenjang Pelaksana disamakan dengan non eselon Gol III/a;
 - d. Jenjang Pelaksana Pemula disamakan dengan non eselon Gol II/d.
- (4) Tambahan Penghasilan untuk tenaga kependidikan diatur sebagai berikut :
 - a. Pengawas sekolah disamakan dengan eselon V Golongan IV;
 - b. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah disamakan dengan eselon V Golongan III;
 - c. Guru, pamong belajar dan penilik disamakan dengan non eselon sesuai golongan;

BAB V PEMBAYARAN Bagian Kesatu Tata Cara

Pasal 12

- (1) Tambahan penghasilan pegawai dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dari masa kinerja dan dikenakan pajak penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan pegawai pada bulan Januari dibayarkan berdasarkan hasil penilaian tingkat disiplin dan penilaian prestasi kerja bulan Desember tahun sebelumnya.
- (3) Tambahan penghasilan pegawai pada bulan Desember dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya.

- (4) Pembayaran tambahan penghasilan pegawai dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) terkait.
- (5) Tata cara pembayaran tambahan penghasilan pegawai dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Kedua Perhitungan

Pasal 13

- (1) Pemberian tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung berdasarkan:
 - a. Tingkat disiplin PNS dan CPNS; dan
 - b. Penilaian prestasi kerja PNS dan CPNS yang terdiri dari Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja.
- (2) Tingkat disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
 - b. menjalankan tugas setiap hari kerja;
 - c. menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan.
- (3) Pemenuhan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan terhadap:
 - a. PNS yang memberitahukan/ memberikan keterangan ketidakhadiran secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
 - b. PNS yang melaksanakan tugas perjalanan dinas, mengikuti pendidikan/pelatihan dan sejenisnya, mengikuti rapat atau pertemuan dan sejenisnya, melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintah atasan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Penilaian Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan kepada pegawai dengan mempertimbangkan tingkat capaian sasaran kerja pegawai atau hasil kerja pegawai yang telah dicapai untuk masa penilaian bulan berkenaan.
- (5) Kriteria perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. orientasi pelayanan;
 - b. integritas;
 - c. komitmen;
 - d. disiplin;
 - e. kerjasama; dan
 - f. kepemimpinan.
- (6) Kriteria kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f hanya diberlakukan bagi pejabat struktural.

Pasal 14

- (1) Khusus tambahan penghasilan pegawai pada bulan Januari diberlakukan perhitungan besaran tambahan penghasilan berdasarkan penilaian pada bulan Desember tahun sebelumnya.
- (2) Tata cara penilaian Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja Pegawai berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) Bobot penilaian tambahan penghasilan pegawai, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Instrumen penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGHENTIAN

Pasal 15

- (1) Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada PNS apabila :
 - a. berstatus sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. berstatus sebagai terdakwa atau terpidana;
 - c. cuti di luar tanggungan negara;
 - d. cuti besar;
 - e. cuti melahirkan kecuali cuti melahirkan anak pertama dan kedua;
 - f. diberhentikan sebagai PNS;
 - g. diberhentikan sementara;
 - h. diberhentikan dari jabatan organik;
 - i. menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
 - j. menjalani masa uang tunggu;
 - k. tidak melaksanakan tugas sesuai penempatan berdasarkan keputusan Bupati; dan
 - l. sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- (2) PNS yang menjalani cuti melahirkan anak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan PNS yang menjalani cuti haji diberikan tambahan penghasilan pegawai maksimal 2 (dua) bulan.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tambahan penghasilan sebesar 80 (delapan puluh)% dari batas maksimal besaran nilai tambahan penghasilan yang ditetapkan.
- (4) Terhadap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perhitungan pemberian tambahan penghasilannya tidak dihitung berdasarkan tingkat disiplin PNS dan penilaian prestasi kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) PNS yang menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf k dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan tambahan penghasilan selama 3 (tiga) bulan;
 - b. hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan tambahan penghasilan selama 6 (enam) bulan.
- (2) Tidak diberikannya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ketetapan hukuman disiplin diterima yang bersangkutan.
- (3) Tim pemantau disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat memberikan rekomendasi penilaian disiplin PNS berdasarkan hasil pengawasan terhadap PNS yang dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 17

- (1) Kebijakan pemberian tambahan penghasilan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan APBD dan/atau ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. besaran tambahan penghasilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - b. cara pembayaran;
 - c. pelaksanaan pembayaran;
 - d. kebenaran usulan pemberian tambahan penghasilan pegawai; dan
 - e. indikator perhitungan tambahan penghasilan. pegawai.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini :

- a. Maka Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

- b. Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 62 Tahun 2014 tentang Standar Tambahan Penghasilan dan Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 27 November 2015

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 27 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 NOMOR 56

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 56 Tahun 2015

TANGGAL : 27 November 2015

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS

1. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DAERAH

NO	KLASIFIKASI	BATAS MAKSIMAL TAMBAHAN PENGHASILAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
A	SEKRETARIAT DAERAH		
	Sekretaris Daerah (Eselon IIa)	40,430,000.00	
	Asisten (Eselon IIb)	20,650,000.00	
	Staf Ahli (Eselon IIb)	15,850,000.00	
	Eselon IIIa Golongan IV	10,700,000.00	
	Eselon IIIa Golongan III	10,000,000.00	
	Eselon IVa Golongan IV	7,100,000.00	
	Eselon IVa Golongan III	6,300,000.00	
	Golongan IVe	4,500,000.00	
	Golongan IVd	4,400,000.00	
	Golongan IVc	4,300,000.00	
	Golongan IVb	4,200,000.00	
	Golongan IVa	4,100,000.00	
	Golongan IIIId	3,400,000.00	
	Golongan IIIc	3,300,000.00	
	Golongan IIIb	3,200,000.00	
	Golongan IIIa	3,100,000.00	
	Golongan IIId	2,400,000.00	
	Golongan IIc	2,300,000.00	
	Golongan IId	2,200,000.00	
	Golongan IIa	2,100,000.00	
	Golongan Id	2,000,000.00	
	Golongan Ic	1,900,000.00	
	Golongan Ib	1,800,000.00	
	Golongan Ia	1,700,000.00	
B	BAGIAN KEUANGAN		
	Eselon IIIa	27,900,000.00	
	Eselon IVa	16,300,000.00	
	Golongan IVe	8,500,000.00	
	Golongan IVd	8,400,000.00	
	Golongan IVc	8,300,000.00	
	Golongan IVb	8,200,000.00	
	Golongan IVa	8,100,000.00	
	Golongan IIIId	7,400,000.00	
	Golongan IIIc	7,300,000.00	
	Golongan IIIb	7,200,000.00	
	Golongan IIIa	7,100,000.00	
	Golongan IIId	5,400,000.00	
	Golongan IIc	5,300,000.00	
	Golongan IId	5,200,000.00	
	Golongan IIa	5,100,000.00	
	Golongan Id	4,000,000.00	
	Golongan Ic	3,900,000.00	
	Golongan Ib	3,800,000.00	
	Golongan Ia	3,700,000.00	

C	BAGIAN PERLENGKAPAN		
	Eselon IIIa	16,100,000.00	
	Eselon IVa	10,700,000.00	
	Golongan IVe	7,500,000.00	
	Golongan IVd	7,400,000.00	
	Golongan IVc	7,300,000.00	
	Golongan IVb	7,200,000.00	
	Golongan IVa	7,100,000.00	
	Golongan IIIId	5,400,000.00	
	Golongan IIId	5,300,000.00	
	Golongan IIId	5,200,000.00	
	Golongan IIIa	5,100,000.00	
	Golongan IId	4,400,000.00	
	Golongan IIc	4,300,000.00	
	Golongan IIb	4,200,000.00	
	Golongan IIa	4,100,000.00	
	Golongan Id	3,000,000.00	
	Golongan Ic	2,900,000.00	
	Golongan Ib	2,800,000.00	
	Golongan Ia	2,700,000.00	
D	BAGIAN HUKUM		
	Eselon IIIa	13.900.000,00	
	Eselon IVa	8,300,000.00	
	Golongan IVe	6,500,000.00	
	Golongan IVd	6,400,000.00	
	Golongan IVc	6,300,000.00	
	Golongan IVb	6,200,000.00	
	Golongan IVa	6,100,000.00	
	Golongan IIIId	5,400,000.00	
	Golongan IIId	5,300,000.00	
	Golongan IIId	5,200,000.00	
	Golongan IIIa	5,100,000.00	
	Golongan IId	3,400,000.00	
	Golongan IIc	3,300,000.00	
	Golongan IIb	3,200,000.00	
	Golongan IIa	3,100,000.00	
	Golongan Id	3,000,000.00	
	Golongan Ic	2,900,000.00	
	Golongan Ib	2,800,000.00	
	Golongan Ia	2,700,000.00	

2. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KLASIFIKASI	BATAS MAKSIMAL TAMBAHAN PENGHASILAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
	Eselon IIb	22,150,000.00	
	Eselon IIIa Golongan IV	17,100,000.00	
	Eselon IIIa Golongan III	15,400,000.00	
	Eselon IIIb Golongan IV	16,170,000.00	
	Eselon IIIb Golongan III	14,470,000.00	
	Eselon IVa Golongan IV	13,500,000.00	

1.	2.	3.	4.
	Eselon IVa Golongan III	11,700,000.00	
	Eselon IVb Golongan IV	13,500,000.00	
	Eselon IVb Golongan III	11,430,000.00	
	Golongan IVe	8,500,000.00	
	Golongan IVd	8,400,000.00	
	Golongan IVc	8,300,000.00	
	Golongan IVb	8,200,000.00	
	Golongan IVa	8,100,000.00	
	Golongan IIIId	6,400,000.00	
	Golongan IIId	6,300,000.00	
	Golongan IIb	6,200,000.00	
	Golongan IIIa	6,100,000.00	
	Golongan IId	4,400,000.00	
	Golongan IIc	4,300,000.00	
	Golongan IIb	4,200,000.00	
	Golongan IIa	4,100,000.00	
	Golongan Id	3,000,000.00	
	Golongan Ic	2,900,000.00	
	Golongan Ib	2,800,000.00	
	Golongan Ia	2,700,000.00	

3. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

NO	KLASIFIKASI	BATAS MAKSIMAL TAMBAHAN PENGHASILAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
	Eselon IIb	16,350,000.00	
	Eselon IIIa Golongan IV	13,700,000.00	
	Eselon IIIa Golongan III	12,000,000.00	
	Eselon IIIb Golongan IV	11,570,000.00	
	Eselon IIIb Golongan III	9,870,000.00	
	Eselon IVa Golongan IV	10,100,000.00	
	Eselon IVa Golongan III	8,300,000.00	
	Eselon IVb Golongan IV	9,930,000.00	
	Eselon IVb Golongan III	8,030,000.00	
	Golongan IVe	7,500,000.00	
	Golongan IVd	7,400,000.00	
	Golongan IVc	7,300,000.00	
	Golongan IVb	7,200,000.00	
	Golongan IVa	7,100,000.00	
	Golongan IIIId	5,400,000.00	
	Golongan IIId	5,300,000.00	
	Golongan IIb	5,200,000.00	
	Golongan IIIa	5,100,000.00	
	Golongan IId	3,400,000.00	
	Golongan IIc	3,300,000.00	
	Golongan IIb	3,200,000.00	
	Golongan IIa	3,100,000.00	
	Golongan Id	3,000,000.00	
	Golongan Ic	2,900,000.00	
	Golongan Ib	2,800,000.00	
	Golongan Ia	2,700,000.00	

1.	2.	3.	4.
	Golongan IIc	4,300,000.00	
	Golongan IIb	4,200,000.00	
	Golongan IIa	4,100,000.00	
	Golongan Id	3,000,000.00	
	Golongan Ic	2,900,000.00	
	Golongan Ib	2,800,000.00	
	Golongan Ia	2,700,000.00	

6. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PADA DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	KLASIFIKASI	BATAS MAKSIMAL TAMBAHAN PENGHASILAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
	Eselon IIb Dokter	18,150,000.00	
	Eselon IIb	13,350,000.00	
	Eselon IIIa Dokter	15,500,000.00	
	Eselon IIIa Golongan IV	10,700,000.00	
	Eselon IIIa Golongan III	10,000,000.00	
	Eselon IIIb Dokter	13,870,000.00	
	Eselon IIIb Golongan IV	8,570,000.00	
	Eselon IIIb Golongan III	7,870,000.00	
	Eselon IVa Dokter	12,300,000.00	
	Eselon IVa Golongan IV	7,100,000.00	
	Eselon IVa Golongan III	6,300,000.00	
	Eselon IVb Dokter	12,030,000.00	
	Eselon IVb Golongan IV	6,930,000.00	
	Eselon IVb Golongan III	6,030,000.00	
	Golongan IVe	4,500,000.00	
	Golongan IVd	4,400,000.00	
	Golongan IVc	4,300,000.00	
	Golongan IVb	4,200,000.00	
	Golongan IVa	4,100,000.00	
	Golongan IIId	3,400,000.00	
	Golongan IIId	3,300,000.00	
	Golongan IIId	3,200,000.00	
	Golongan IIIa	3,100,000.00	
	Golongan IIId	2,400,000.00	
	Golongan IIc	2,300,000.00	
	Golongan IIb	2,200,000.00	
	Golongan IIa	2,100,000.00	
	Golongan Id	2,000,000.00	
	Golongan Ic	1,900,000.00	
	Golongan Ib	1,800,000.00	
	Golongan Ia	1,700,000.00	

7. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PADA SKPD LAINNYA

NO	KLASIFIKASI	BATAS MAKSIMAL TAMBAHAN PENGHASILAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
	Eselon IIb	13,350,000.00	
	Eselon IIIa Golongan IV	10,700,000.00	
	Eselon IIIa Golongan III	10,000,000.00	
	Eselon IIIb Golongan IV	8,570,000.00	
	Eselon IIIb Golongan III	7,870,000.00	
	Eselon IVa Golongan IV	7,100,000.00	
	Eselon IVa Golongan III	6,300,000.00	
	Eselon IVb Golongan IV	6,930,000.00	
	Eselon IVb Golongan III	6,030,000.00	

1.	2.	3.	4.
	Eselon V Golongan IV	6,500,000.00	
	Eselon V Golongan III	5,500,000.00	
	Golongan IVe	4,500,000.00	
	Golongan IVd	4,400,000.00	
	Golongan IVc	4,300,000.00	
	Golongan IVb	4,200,000.00	
	Golongan IVa	4,100,000.00	
	Golongan IIIId	3,400,000.00	
	Golongan IIIc	3,300,000.00	
	Golongan IIIb	3,200,000.00	
	Golongan IIIa	3,100,000.00	
	Golongan IIId	2,400,000.00	
	Golongan IIc	2,300,000.00	
	Golongan IId	2,200,000.00	
	Golongan IIa	2,100,000.00	
	Golongan Id	2,000,000.00	
	Golongan Ic	1,900,000.00	
	Golongan Ib	1,800,000.00	
	Golongan Ia	1,700,000.00	

8. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PADA DAERAH TERPENCIL

NO	KLASIFIKASI	TAMBAHAN BATAS MAKSIMAL AMBAHAN PENGHASILAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
	PNS yang ditugaskan pada daerah terpencil	750,000.00	Penetapan daerah terpencil ditetapkan melalui Keputusan Bupati

Keterangan : Diberikan sebagai penambah tambahan penghasilan bagi pegawai pada SKPD terkait sesuai dengan kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini

9. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PADA LINGKUNGAN BERESIKO TINGGI

NO	KLASIFIKASI	TAMBAHAN BATAS MAKSIMAL TAMBAHAN PENGHASILAN	KET
1.	2.	3.	4.
	PNS yang ditugaskan pada lingkungan yang memiliki bahaya radiasi	750,000.00	

Keterangan : Diberikan sebagai penambah tambahan penghasilan bagi pegawai pada SKPD terkait sesuai dengan kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini

10. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TERHADAP PROFESI LANGKA

NO	KLASIFIKASI	TAMBAHAN BATAS MAKSIMAL TAMBAHAN PENGHASILAN	KET
	PNS yang berprofesi sebagai dokter subspesialis	30,000,000.00	
	PNS yang berprofesi sebagai dokter spesialis	18,000,000.00	

Keterangan : Diberikan sebagai penambah tambahan penghasilan bagi pegawai pada SKPD terkait sesuai dengan kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini

Pj. BUPATI BENGKALIS,

H. AHMAD SYAH HARROFIE

KRITERIA, INDIKATOR, DAN BOBOT PENILAIAN TPP

Bengkalis, 20xx
Pejabat Penilai/Atasan Langsung

B.2. Buku Catatan Penilaian Perilaku PNS

BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU PNS

Nama :
NIP :
Jangka Waktu Penilaian :

No	Tanggal	Uraian	Nama/NIP dan Paraf Pejabat Penilai
1	2	3	4
1	1 Januari s/d 31 Januari 20xx	Penilaian SKP sampai dengan akhir Bulan berkenaan = Sedangkan penilaian perilaku kerjanya adalah sebagai berikut : Orientasi Pelayanan = Integritas = Komitmen = Disiplin = Kerjasama = Kepemimpinan = Jumlah = Nilai Rata-rata =	Atasan Langsung

B.3. Lembaran Penilaian Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai
B.3.1 Lembaran Penilaian Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Selain
Tenaga Guru

LEMBARAN PENILAIAN
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

NAMA :
NIP :
PANGKAT/GOLONGAN :
JABATAN/PEKERJAAN :
INSTANSI/SKPD :

NO	KRITERIA dan INDIKATOR		PERSENTASE PENILAIAN TPP			
I.	DISIPLIN	60%				
	1. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja	15%	>= 20 hk	19-15 hk	14-10 hk	< 10 hk
			15	14/13/12/11/10	9/8/7/6/5	4
	Hasil Penilaian					
	2. Menjalankan tugas setiap hari kerja	20%	>= 20 hk	19-15 hk	14-10 hk	< 10 hk
			20	18,8/17,6/16,4/15,2/14	12,8/11,6/10,4/9,2/8	6,8
	Hasil Penilaian					
	3. Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan	25%	Tepat waktu	Lebih 1 hari	Lebih 2 hari	Lebih 3 hari
			25	23,5/22/20,5/19/17,5	16/14,5/13/11,5/10	8,5
	Hasil Penilaian					
SUB TOTAL PENILAIAN (1+2+3)						
II.	PRESTASI KERJA PEGAWAI	40%				
	1.Sasaran Kinerja Pegawai	25%	>80-100	>70-80	>65-70	<=65
			25	18,75	12,5	6,25
	Hasil Penilaian					
	2.Perilaku Kerja	15%	>80-100	>70-80	>65-70	<=65
			15	11,25	7,5	3,75
	Hasil Penilaian					
SUB TOTAL PENILAIAN (1+2)						
TOTAL PENILAIAN (I +II)						

Bengkalis,
Pejabat Penilai/Atasan Langsung,

(N A M A)
(Pangkat)
NIP.....

B.3.2 Lembaran Penilaian Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Khusus Bagi Tenaga Guru

LEMBARAN PENILAIAN
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

NAMA :
NIP :
PANGKAT/GOLONGAN :
JABATAN/PEKERJAAN :
INSTANSI/SKPD :

NO	KRITERIA dan INDIKATOR		PERSENTASE PENILAIAN TPP			
I.	DISIPLIN	60%				
	1. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja	15%	>= 20 hk	19-15 hk	14-10 hk	< 10 hk
			15	14/13/12/11/10	9/8/7/6/5	4
	2. Menjalankan tugas setiap hari kerja (Guru *)	20%	>= 96 jam mengajar	95-63 jam mengajar	62-30 jam mengajar	< 30 jam mengajar
			20	15,5	10,5	6
	Hasil Penilaian					
	Menjalankan tugas setiap hari kerja (Kepala Satuan Pendidikan) *)	20%	>= 24 jam mengajar	23-16 jam mengajar	15-8 jam mengajar	< 8 jam mengajar
			20	15,5	10,5	6
	Hasil Penilaian					
	Menjalankan tugas setiap hari kerja (Wakil Kepala Satuan Pendidikan) *)	20%	>= 48 jam mengajar	47-31 jam mengajar	30-16 jam mengajar	< 16 jam mengajar
			20	15,5	10,5	6
	Hasil Penilaian					
	Menjalankan tugas setiap hari kerja (Kepala Perpustakaan/Kepala Laboratorium/Kepala Bengkel/Kepala Unit Produksi/Ketua Program Keahlian/Program Studi dan Sejenisnya) *)	20%	>= 48 jam mengajar	47-31 jam mengajar	30-16 jam mengajar	< 16 jam mengajar
			20	15,5	10,5	6
	Menjalankan tugas setiap hari kerja (Guru Pembimbing Khusus Pada Satuan Pendidikan Yang Menyelenggarakan Pendidikan Inklusi atau Pendidikan Terpadu) *)	20%	>= 24 jam mengajar	23-16 jam mengajar	15-8 jam mengajar	< 8 jam mengajar
			20	15,5	10,5	6
	Hasil Penilaian					

	Menjalankan tugas setiap hari kerja (Guru yang Melaksanakan tugas lain *)	20%	19-15 hk	14-10 Hk	< 10 hk	>= 20 hk
			18,8/17,6/16,4/15,2/14	12,8/11,6/10,4/9,2/8	6,8	20
	Hasil Penilaian					
	3. Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan	25%	Tepat waktu 25	Lebih 1 hari 23,5/22/20,5/19/17,5	Lebih 2 hari 16/14,5/13/11,5/10	Lebih 3 hari 8,5
	Hasil Penilaian					
	SUB TOTAL PENILAIAN (1+2+3)					
II.	PRESTASI KERJA PEGAWAI	40%				
	1.Sasaran Kinerja Pegawai	25%	>80-100 25	>70-80 18,75	>65-70 12,5	<=65 6,25
	Hasil Penilaian					
	2.Perilaku Kerja	15%	>80-100 15	>70-80 11,25	>65-70 7,5	<=65 3,75
	Hasil Penilaian					
	SUB TOTAL PENILAIAN (1+2)					
	TOTAL PENILAIAN (I +II)					

Keterangan : *) Disesuaikan dengan kedudukan dan fungsi

Bengkalis,
Pejabat Penilai/Atasan Langsung,

(N A M A)
(Pangkat)
NIP.....

Pj. BUPATI BENGKALIS,

H. AHMAD SYAH HARROFIE